

ABSTRAK

Restorasi Kebijakan merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengevaluasi efektivitas daripada kebijakannya yang telah ditetapkan sebelumnya. Seringkali kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah tidak melihat pada aspek kebutuhan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum di daerahnya, melainkan berbagai macam kehendak politik yang ditetapkannya suatu kebijakan. Hal inilah yang seharusnya menjadi atensi dalam menjalankan birokrasi supaya tidak hanya minoritas dan golongan tertentu saja yang diuntungkan. Karena sejatinya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah haruslah mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk daerah otoritasnya dan Masyarakat di daerah itu. Kebijakan tambang oleh Pemerintah Daerah Pamekasan yang seolah kurang memberikan kepastian hukum atas jaminan perlindungan lingkungan dan hak Masyarakat terdampak yang seharusnya menjadi alasan utama bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk merestorasi kebijakannya. Karenanya urgensi penelitian ini dilakukan dalam rangka menyoroti kebijakan pertambangan yang seolah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan kurang merespons dengan baik terkait dengan permasalahan tambang yang ada.

Adapun metode penelitian yang dilakukan ialah penelitian normatif. Serta dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan norma/undang-undang dan juga pendekatan kasus.

Hasil daripada penelitian ini bahwa fenomena tambang ilegal di Pamekasan, serta kebijakan daripada pemerintah daerah itu sendiri masih belum memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan Lingkungan di Pamekasan. Sehingga perlu adanya upaya restorasi kebijakan di Kabupaten Pameksan sebagai wujud konkrit keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan hukum tambang ilegal di Pamekasan.

Kata Kunci: Pertambangan – Kebijakan – Restorasi

ABSTRACT

Policy Restoration is one of the efforts that can be made by the government in terms of evaluating the effectiveness of its previously established policies. Often the policies made and determined by the government do not look at the aspect of the need to solve a legal problem in their area, but rather the various kinds of political will that determine a policy. This should be an attention in running the bureaucracy so that not only minorities and certain groups benefit. Because in fact the policies set by the government, in this case the regional government, must be able to bring changes for the better for the area of authority and the community in that area. The mining policy by the Pamekasan Regional Government, which seems to lack legal certainty over environmental protection guarantees and the rights of affected communities, should be the main reason for the Pamekasan Regency Government to restore its policies. Therefore, the urgency of this research is carried out in order to highlight the mining policy that seems as if the Pamekasan Regency Government is not responding well to the existing mining problems.

The research method used is normative research. And by using a research approach in the form of a norm / law approach and also a case approach.

The result of this research is that the phenomenon of illegal mining in Pamekasan, as well as the policy of the local government itself still does not provide legal certainty for environmental protection in Pamekasan. So that there needs to be a policy restoration effort in Pameksan Regency as a concrete manifestation of the local government's seriousness in solving the legal problems of illegal mining in Pamekasan.

Keywords: Mining - Policy - Restoration